



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Junaidi Junaidi
Assignment title: Jurnal
Submission title: KETERLIBATAN AMERIKA SERIKAT
File name: Jurnal_Junaidi-dikonversi_2.docx
File size: 116.79K
Page count: 15
Word count: 4,734
Character count: 31,313
Submission date: 19-May-2021 11:37AM (UTC)
Submission ID: 1589295904

ORIGINALITY REPORT

29%
SIMILARITY INDEX



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Phil I Ketut Gunawan, MA.
NIP. 19631222 199002 1 001

e-Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 9 No. 1, 2021 ISSN: 2477-2623

KETERLIBATAN AMERIKA SERIKAT DALAM DEMONSTRASI PRO DEMOKRASI DI HONG-KONG

Junaidi¹

Abstract: This research aimed to explain the reasons for the United States being involved in pro-democracy demonstrations in Hong Kong in 2019. These reasons are analyzed using the concepts of Liberal Interventionism and Neorealism Theory. The reasons why the United States was involved in pro-democracy demonstrations in Hong Kong, among others, was due to the existence of legal rules that regulated the US justification for being involved in Hong Kong, namely the HK Policy Act 1992, then there was motivation to prevent human rights violations and the democratic crisis by realizing an international democratization program that was sustainable, and the desire to maintain political influence in Hong Kong in order to safeguard its large economic interests and on the other hand also to stem China influence.

Keywords: United States reasons, Pro Democracy Demonstrations, HK Policy Act 1992, United States Interest.

Pendahuluan

Hong Kong, sejak dikuasai hingga tahun 1997 oleh Inggris, akhirnya wilayah tersebut menjadi wilayah administrasi khusus Tiongkok, yang menjalankan pemerintah dengan prinsip *one state two systems* (satu negara dengan dua sistem). Dengan menjadi bagian administrasi khusus Tiongkok, pelaksanaan *one state two systems* berimplikasi pada beberapa hal, seperti Hong Kong yang menggunakan sistem liberalis untuk kegiatan perekonomian, sosial dan politiknya sehingga sistem sosialis komunis milik Tiongkok tidak berlaku di Hong Kong dan pemberian hak otonomi yang luas dalam segala urusan bagi Hong Kong, kecuali untuk kegiatan luar negeri dan pertahanan. Hal tersebut berlaku 50 tahun terhitung sejak 1997. (Astin Y. So, 2011).

Namun dalam pelaksanaannya, prinsip *one state two systems* mulai tergerus keberadaannya karena adanya amandemen undang-undang ekstradisi yang dilakukan oleh pemerintah Hong Kong yang diketahui memiliki kedekatan dengan pemerintah pusat Tiongkok untuk mengizinkan sebuah negara atau wilayah memiliki perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong sehingga pihak Tiongkok juga termasuk dalam salah satu wilayah yang diizinkan. Padahal sebelum itu, Tiongkok sangat dikecualikan oleh Hong Kong. Hal ini akhirnya menjadi awal pemicu demonstrasi yang terjadi di Hong Kong (Sarah Cook, 2019). Demonstrasi yang terjadi di Hong Kong awalnya menuntut untuk dibatalkannya RUU ekstradisi yang direncanakan oleh pemerintah Hong Kong. Akan tetapi, pemerintah tidak mendengarkan tuntutan yang dilakukan oleh para

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maulana Wahidena. E-mail: Pratiyanjani@gmail.com